

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkaji terhadap berbagai sumber teori maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 *Environmental Social Governance*

2.1.1.1 *Pengertian Environmental Social Governance*

Menurut Suripno (2025:8) penilaian terhadap kinerja perusahaan dilakukan melalui kerangka *Environmental Social Governance* yang meliputi aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan.

Menurut Hanggraeni (2023:1) ESG sebagai suatu Kumpulan kriteris evaluasi kinerja perusahaan yang menilai kekuatan mekanisme tata Kelola perusahaan dan kemampuan untuk secara efektif mengelola dampak lingkungan dan sosial.

Menurut Yudiansyah & Burhany (2025) menyatakan bahwa ESG adalah representasi dari tiga pilar keberlanjutan yang menilai bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan (*Environmental*), tanggung jawab sosial (*Social*), dan tata Kelola yang transparan dan etis (*Governance*)

Menurut Shadra & Hutapea (2024) menyatakan bahwa

“ESG merupakan seperangkat kriteria yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas atas aktivitas bisnisnya kepada para pemangku kepentingan. Kerangka ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu lingkungan (*Environmental*), sosial, dan tata Kelola. Melalui penerapan ketiga aspek tersebut, perusahaan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai yang berkelanjutan dalam jangka panjang”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ESG merupakan salah satu bentuk pelaporan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait kondisi perusahaan akibat dari dampak operasional perusahaan secara berkelanjutan.

2.1.1.2 Komponen *Environmental Social Governance*

Environmental Social Governance terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan berperan penting dalam mengukur keberlanjutan serta tanggung jawab perusahaan secara menyeluruh. Komponen tersebut mencerminkan dimensi spesifik yang mencakup dampak lingkungan, kontribusi sosial, serta struktur dan tata Kelola perusahaan. berikut adalah tiga komponen *Environmental Social Governance*:

1. “*Environmental* (Lingkungan)
Aspek lingkungan berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal ini mencakup pengelolaan limbah, pengurangan emisi, pemanfaatan sumber daya alam, serta Upaya untuk mengurangi jejak karbon. Perusahaan yang memprioritaskan aspek lingkungan, cenderung berinvestasi dalam teknologi berkelanjutan dan menerapkan praktik ramah lingkungan atau berkelanjutan.
2. *Social* (Social)

Aspek sosial berkaitan dengan keterlibatan antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, serta masyarakat. Perusahaan yang memperhatikan terkait isu sosial umumnya menangani hal-hal seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia. Beberapa contoh yang berkaitan dengan aspek sosial antara lain mendukung atau membantu masyarakat setempat, mendorong keberagaman di tempat kerja dan secara proaktif melibatkan para pemangku kepentingan.

3. *Governance* (Tata Kelola)

Aspek tata kelola berkaitan dengan bagaimana cara suatu perusahaan dikelola, dipimpin, dan diawasi. Transparansi, akuntabilitas, independensi dewan direksi, keadilan, serta perlindungan kepentingan semua pemangku kepentingan merupakan komponen penting dari tata Kelola perusahaan yang baik atau efektif. Perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut umumnya memiliki struktur organisasi yang kuat, proses pengambilan Keputusan yang transparan, serta pengawasan yang efektif.”

2.1.1.3 Manfaat Penerapan *Environmental Social Governance*

Environmental Social Governance dapat dikatakan sebagai pendoman yang membantu perusahaan menjalankan operasional secara bertanggung jawab. Melalui kerangka ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan dampak kegiatan terhadap lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Penerapan ESG yang baik akan berdampak langsung pada citra perusahaan. Reputasi positif tersebut dapat terbentuk karena perusahaan dianggap lebih transparan dan peduli terhadap isu sosial maupun lingkungan. Menurut Nurdiani (2025:88-89) manfaat dari ESG dalam praktik sebagai berikut:

1. “Meningkatkan reputasi
Penerapan ESG bukan hanya sekedar tren, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya peningkatan reputasi maka perusahaan dapat menarik lebih banyak investor, mengurangi risiko dan memiliki daya saing. Jika suatu perusahaan memiliki inisiatif ESG yang kuat maka investor akan berinvestasi dalam jangka panjang.
2. Mengurangi Risiko

Dalam mengelola Risiko ESG, perusahaan dapat mengurangi dampak negative terhadap lingkungan, sosial dan tata Kelola. Praktik ESG yang baik membantu meningkatkan efisiensi operasional, seperti pengurangan limbah dan konsumsi energi yang berkontribusi pada keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

3. Meningkatkan kinerja keuangan
Perusahaan yang berkelanjutan meningkatkan kinerja keuangan cenderung lebih stabil dan mampu mencapai pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, menerapkan ESG bukan hanya tentang tanggung jawab sosial lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing, dan kinerja keuangan secara keseluruhan.”

2.1.1.4 Standar Pelaporan *Environmental Social Governance*

Standar pelaporan ESG merupakan seperangkat pedoman yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka terkait kinerja dan dampak operasionalnya. Melalui kerangka ini, perusahaan melaporkan aspek penting yang mencakup lingkungan, sosial dan tata Kelola. Standar pelaporan ini membantu perusahaan dalam menyusun laporan sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan antar perusahaan. Berikut beberapa standar pelaporan ESG menurut Suripno (2025:77-99)

1. *“Global Reporting Intitative (GRI)*
GRI adalah organisasi independent internasional yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara global. Standar GRI memberikan kerangka kerja komprehensif untuk pengungkapan informasi keberlanjutan, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola (ESG). Standar GRI didesain untuk membantu organisasi untuk mengukur dan melaporkan dampak mereka pada dunia.
2. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*
SASB mengembangkan standar pelaporan yang dirancang untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor. Standar ini dirancang agar informasi yang diungkapkan dapat membantu investor dalam membuat Keputusan yang lebih baik berdasarkan Risiko dan peluang yang terkait dengan isu keberlanjutan.
3. *International Sustainability Standards Board (ISSB)*

International Sustainability Standards Board (ISSB) didirikan pada tahun 2021 sebagai badan independent yang bertujuan untuk menetapkan standar pengungkapan keberlanjutan global. Tujuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk pelaporan informasi keberlanjutan yang material bagi investor. Standar ISSG meliputi berbagai topik keberlanjutan, termasuk perubahan iklim, tata Kelola, dan sosial.

4. *Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)*
Standar pelaporan *Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)* adalah kerangka kerja global untuk pelaporan Risiko dan peluang terkait iklim. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pelaporan informasi iklim oleh perusahaan, sehingga membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami eksposur, strategi, dan manajemen Risiko iklim perusahaan.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Dengan meningkatkan perhatian terhadap isu lingkungan, sosial dan tata Kelola (ESG), OJK berkomitmen untuk mendorong perusahaan dalam menerapkan praktik keberlanjutan yang baik. OJK mengeluarkan Peraturan OJK N0. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Standar laporan keberlanjutan dari OJK merupakan langkah penting dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam praktik keberlanjutan mereka.”

2.1.1.5 Pengertian *Environmental Social Governance Disclosure*

Menurut Propheta et al., (2025) pengungkapan ESG merupakan pendekatan baru dalam penyampaian informasi perusahaan secara sukarela. Pendekatan ini berkembang dari *Corporate social responsibility (CSR)* dan laporan keberlanjutan.

Menurut Hasna et al., (2024) pengungkapan ESG mencerminkan upaya perusahaan dalam menyampaikan informasi secara terbuka kepada para pemangku kepentingan terkait kinerja non-keuangan, mencakup berbagai aspek penting seperti lingkungan, tanggung jawab sosial serta tata kelola perusahaan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Environmental Social Governance Disclosure* merupakan salah satu bentuk cara perusahaan dalam

menyampaikan informasi mengenai risiko dan kinerja perusahaan terkait keberlanjutan. Tujuan pengungkapan ini untuk menilai apakah suatu perusahaan telah berkomitmen terhadap aspek keberlanjutan serta bagaimana perusahaan mengelola dampak dari kegiatan operasionalnya.

2.1.1.6 Pengukuran *Environmental Social Governance Disclosure*

Penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan suatu perusahaan memerlukan indikator atau metode penilaian yang terstandar. Pengukuran tingkat *Environmental Social Governance Disclosure* dapat merujuk pada skor yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat independent seperti Bloomberg, Sustainalytics, Refinitiv, dan S&P Global. Selain menggunakan skor, analisis konten pada laporan keberlanjutan dengan berpedoman pada standar GRI dapat menjadi salah satu metode pengukuran yang digunakan. Pengukuran pada penelitian ini digunakan Standar GRI 2021 mencakup kategori *Environmental* (GRI 300) sebanyak 31 item, *Social* (GRI 4000 sebanyak 36 item dan *Governance* (GRI 2) sebanyak 13 item. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan kesesuaian antara pedoman pelaporan terstandarisasi dengan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Perhitungan pengungkapan *Environmental Social Governance* menggunakan acuan Standar GRI 2021 dilakukan dengan memberikan nilai 1, jika perusahaan mengungkapkan item atau indikator dan nilai 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan item atau indikator. Berikut rumus terkait *Environmental Social Governance* menurut (Shadra & Hutapea, 2024)

$$ESG = \frac{\text{Jumlah item pengungkapan}}{\text{Total nilai item pengungkapan}}$$

Berdasarkan metode pengukuran yang digunakan peneliti, berikut daftar pengungkapan standar GRI 2021.

Tabel 2.1
Daftar Pengungkapan Standar GRI 2021

No	GRI STANDAR 2021	DISCLOSURE
Aspek: Tata Kelola		
1	GRI 2: General Disclosure 2021	2-9 Struktur dan Komposisi Tata Kelola
2		2-10 Pencalonan dan Pemilihan Badan Tata Kelola Tertinggi
3		2-11 Ketua Badan Tata Kelola Tertinggi
4		2-12 Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
5		2-13 Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
6		2-14 Peran badan tata Kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
7		2-15 Konflik kepentingan
8		2-16 Komunikasi masalah penting
9		2-17 Pengetahuan kolektif badan tata Kelola tertinggi
10		2-18 Evaluasi kinerja badan tata Kelola tertinggi
11		2-19 Kebijakan remunerasi
12		2-20 Proses untuk menentukan remunerasi
13		2-21 Rasio kompensasi tata kelola
Aspek: Lingkungan		
14	GRI 301: Material 2016	301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume
15		301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan

No	GRI STANDAR 2021	DISCLOSURE
16		301-3 Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
17	GRI 302: Energi 2016	302-1 Komsumsi energi dalam organisasi
18		302-2 Konsumsi energi di luar organisasi
19		302-3 Intensitas energi
20		302-4 Pengurangan konsumsi energi
21		302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
22	GRI 303: Air dan Efluen 2018	303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
23		303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
24		303-3 Pengambilan air
25		303-4 Pembungan air
26		303-5 Komsumsi air
27	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan Kawasan lindung dan Kawasan dengan nilai keanekaragaman 8 hayati tinggi di luar Kawasan lindung
28		304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
29		304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi
30		304-4 Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
31	GRI 305: Emisi 2016	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
32		305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
33		305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
34		305-4 Intensitas Emisi GRK
35		305-5 Pengurangan Emisi GRK

No	GRI STANDAR 2021	DISCLOSURE
36		305-6 Emisi Zat Perusak Ozon (ODS)
37		305-7 Nitrogen Oksida (NO _x), Belerang Oksida (SO _x), dan emisi udara signifikan lainnya
38		306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
39		306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah
40	GRI 306: Limbah 2020	306-3 Timbulan Limbah
41		306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
42		306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
43	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
44		308-2 Dampak lingkungan negative dalam rantai pasokan dan Tindakan yang telah diambil
Aspek: Sosial		
45		401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
46	GRI 401: Kepegawaian 2016	401-2 Tunjangan yan diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
47		401-3 Cuti melahirkan
48	GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
49		403-1 Sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja
50	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan kerja 2018	403-2 Pengungkapan, pengidentifikasian bahaya, penilaian Risiko dan investigasi insiden
51		403-3 Layanan Kesehatan kerja
52		403-4 Partisipasi, konsultasi dan komunikasi pekerja tentang Kesehatan dan keselamatan kerja

No	GRI STANDAR 2021	DISCLOSURE
53		403-5 Pelatihan pekerja mengenai Kesehatan dan keselamatan kerja
54		403-6 Peningkatan kualitas Kesehatan kerja
55		403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak Kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
56		403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
57		403-9 Kecelakaan kerja
58		403-10 Penyakit akibat kerja
59		GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016
60	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	
61	404-3 Persenntase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	
62	GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016	405-1 Keanekaragaman badan tata Kelola dan karyawan
63		405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi Perempuan dibandingkan laki-laki
64	GRI 406: Nondiskriminasi 2016	406-1 Insiden diskriminasi dan Tindakan perbaikan yang dilakukan
65	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	407-1 Operasi dan pemasok di mana ha katas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
66	GRI 408: Perkerja Anak 2016	408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
67	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
68	GRI 410: Praktik Keamanan 2016	410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
69	GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat
70	GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan

No	GRI STANDAR 2021	DISCLOSURE
71		413-2 Operasi yang secara actual dan yang berpotensi memiliki dampak negative signifikan terhadap masyarakat setempat
72	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
73		414-2 Dampak sosial negative dalam rantai pasokan dan Tindakan yang telah diambil
74	GRI 415: Kebijakan Publik 2016	415-1 Kontribusi politik
75	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	416-1 Penilaian dampak Kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
76		416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
77	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
78		417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
79		417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
80	GRI 418: Privasi Pelanggaran 2016	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggaran dan hilangnya data pelanggan

Sumber: Standar GRI 2021

2.1.2 *Intellectual Capital*

2.1.2.1 *Pengertian Intellectual Capital*

Menurut Ulum (2017:79), menyatakan bahwa *Intellectual Capital* adalah

“Modal Intelektual di definisikan sebagai selisih/perbedaan antara nilai perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari nilai *financial capital*. Modal intelektual adalah istilah yang diberikan atas kombinasi aset tak berwujud, property intelektual, karyawan dan infrastruktur perusahaan yang kemudian dapat berfungsi dengan baik.”

Menurut Noor (2021:2) *Intellectual Capital* adalah

“*Intellectual Capital* atau modal intelektual adalah suatu aset yang tidak berwujud yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing perusahaan serta memberikan nilai dibandingkan perusahaan lain.”

Menurut Arifin et al., (2021:36) *Intellectual Capital* adalah

“*Intellectual Capital* dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital, customer capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Intellectual Capital* merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset sumber daya tak berwujud yang bertujuan untuk menilai perusahaan dalam prospek jangka panjang. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Komponen *Intellectual Capital*

Elemen komponen *Intellectual Capital* telah dirumuskan secara struktur pada tahun 1998 melalui *International Federation of Accountant* (IFAC). Klasifikasi dibagi menjadi 3 kelompok, meliputi *organizational capital, relational capital*, dan *human capital* (Ulum, 2017). Berikut tabel klasifikasi *Intellectual Capital*.

Tabel 2.2
Klasifikasi *Intellectual Capital*

<i>Organizational Capital</i>	<i>Ralational Capital</i>	<i>Human Capital</i>
<i>Intellectual Property:</i>	- <i>Brands</i>	- <i>Know-how</i>
- <i>Patents</i>	- <i>Customers</i>	- <i>Education</i>
- <i>Copyrights</i>	- <i>Customers Loyalty</i>	- <i>Vocational</i>
- <i>Design Rights</i>	- <i>Backlog Orders</i>	<i>Qualification</i>
- <i>Trade Secret</i>	- <i>Company Names</i>	- <i>Work-Related</i>
- <i>Trademarks</i>	- <i>Distribution</i>	<i>Competencies</i>
- <i>Service Marks</i>	<i>Channels</i>	- <i>Entrepreneurial</i>
	- <i>Business</i>	<i>spirit,</i>
<i>Infrastructure Assets:</i>	<i>Collaboration</i>	<i>innovativeness,</i>
- <i>Management</i>	- <i>Licensing</i>	<i>proactive abilities,</i>
<i>Philosophy</i>	<i>Agreements</i>	<i>changeability</i>
- <i>Corporate Culture</i>	- <i>Favourable</i>	- <i>Psychometric</i>
- <i>Management</i>	<i>Contracts</i>	<i>valuation</i>
<i>Processes</i>	- <i>Franchising</i>	
- <i>Information Systems</i>	<i>Agreement</i>	
- <i>Networking Systems</i>		
- <i>Financial Relations</i>		

Sumber: Ulum, 2017

Berikut penjelasan terkait komponen *Intellectual Capital*

1. Modal structural

Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi proses kegiatan perusahaan dan strukturnya yang mendukung Upaya karyawan dalam mengoptimalkan kinerja intelektual dan bisnis secara keseluruhan.

Seorang individu memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi ketika

organisasi memiliki sistem dan prosedur yang baik, tetapi jika sistem dan prosedurnya buruk maka *intellectual capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang maksimal.

2. Modal relasional

Keseluruhan nilai yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, seperti *networking*, kontrak dan perjanjian. *Relational Capital* terbentuk melalui dari berbagai eksternal perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

3. Modal manusia

Sumber pengetahuan, keterampilan dan kompensasi yang berguna dalam suatu perusahaan. mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan solusi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan. Pengembangan dan pemanfaatan tenaga kerja secara efisien oleh perusahaan dapat meningkatkan kualitas *Human Capital*.

2.1.2.3 Pengukuran *Intellectual Capital*

Pengukuran modal intelektual mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai. Salah satu metode yang digunakan adalah metode *value added intellectual coefficient* (VAIC™) dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1998. Konsep ini dapat menilai sejauh mana perusahaan dapat mengelola aset tak berwujud. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur *Intellectual Capital* sebagai berikut (Ulum, 2017).

1. *Value added intellectual capital coefficient (VAICTM)*

Penyampaian informasi mengenai *value creation efficiency* dari aset berwujud dan aset tak berwujud dalam perusahaan. pendekatan ini relative mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut rumus terkait *value added intellectual coefficient (VAICTM)*.

$$VAIC^{TM} = VACA + VAHU + STVA$$

Keterangan:

VACA: *Valued Added Capital Employed*

VAHU: *Valued Added Human Capital*

STVA: *Structural Capital Value Added*

2. *Modified VAICTM*

Model pengukuran kinerja IC berbasis model Pulic. Berikut rumus terkait *Modified VAIC*.

$$MVAIC = ICE + CEE$$

Keterangan:

ICE : *Intellectual Capital Efficiency*

CEE : *Capital Employed Efficiency*

3. *Extended VAICTM Plus*

Modifikasi lanjutan dari model VAICTM yang menempatkan taksonomi IC pada posisi yang lebih tepat. Berikut rumus terkait *Extended VAICTM*

$$EVAIC Plus = ICE + CEE$$

Keterangan:

ICE : *Intellectual Capital Efficiency*

CEE : *Capital Employed Efficiency*

Pengukuran *Intellectual Capital* dalam penelitian ini menggunakan *value added intellectual coefficient* (VAIC™) dikarenakan metode mengukur penciptaan nilai perusahaan dari modal manusia, modal structural dan modal fisik serta komponen data dalam metode pengukuran ini terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Berikut rumus terkait *value added intellectual coefficient* (VAIC™) sebagai berikut:

1. Menghitung *Valued Added* (VA)

Value Added adalah indikator paling objektif dalam menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai. Perhitungan VA sebagai berikut:

$$VA = OUT - IN$$

atau

$$VA = OP + EC + D + A$$

Keterangan:

OUT : Total penjualan dan pendapatan lain

IN : Beban penjualan dan biaya lain-lain (selain beban karyawan)

OP : Laba Operasi

EC : Beban Karyawan

D : Depresiasi

A : Amortisasi

2. Menghitung *Value Added Capital Employed* (VACA)

Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit CE terhadap VA perusahaan.

$$VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan

VA : *Value Added*

CE : *Capital Employee*, dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

3. Menghitung *Value Added Human Capital* (VAHU)

Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap VA perusahaan.

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan

VA : *Value Added*

HC : *Human Capital*, beban karyawan

4. Menghitung *Structural Capital Value Added* (STVA)

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan

SC : *Value Added – Human Capital*

VA : *Value Added*

5. Menghitung *Value Added Intellectual Capital Coefficient*

Mengindikasikan kemampuan intelektual perusahaan yang dapat juga sebagai BPI (*Business Performance Indikator*).

$$\text{VAIC}^{\text{TM}} = \text{VACA} + \text{VAHU} + \text{STVA}$$

Keterangan:

VACA: *Valued Added Capital Employed*

VAHU: *Valued Added Human Capital*

STVA: *Structural Capital Value Added*

Berikut kriteria penilaian *Intellectual Capital* menurut (Ulum, 2017)

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian *Intellectual Capital*

Kategori	Penilaian
<i>Top Performers</i>	MVAIC di atas 3,50
<i>Good Peformers</i>	MVAIC antara 2,50 – 3,49
<i>Common Performers</i>	MVAIC antara 1,50 – 2,49
<i>Bad Performers</i>	MVAIC dibawah 1,50

Sumber: (Ulum, 2017)

2.1.3 Nilai Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Putra et al., (2024:9), nilai perusahaan adalah

“Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat Kesehatan dan kinerja perusahaan, yang berhubungan erat dengan harga sahamnya.”

Menurut Fahmi (2020:142), nilai perusahaan adalah

“Nilai perusahaan adalah rasio nilai pasar yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pinjaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang.”

Menurut Risman (2021:5), nilai perusahaan adalah

“Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari arus kas di masa akan datang, arus kas di masa akan datang tersebut dipengaruhi Risiko yang dapat menyebabkan kemungkinan mengalami penyimpangan (deviasi).”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan kondisi yang mencerminkan hasil pengelolaan suatu perusahaan secara keseluruhan yang tercermin dari harga saham atau nilai pasar serta memiliki pengaruh terhadap keputusan investor dalam investasi.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Menurut Hartono (2014) dalam Putra et al., (2024:29) secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan sebagai berikut

1. “Faktor internal perusahaan, yakni faktor di dalam perusahaan yang bisa dikontrol oleh manajemen perusahaan. contohnya, produksi, pemasaran, ataupun pengumuman pendanaan yang menyangkut hutang ataupun ekuitas. Perusahaan dengan kinerja keuangan baik, maka akan menjadikan investor tertarik untuk melakukan penanaman modal pada perusahaan tersebut dengan melakukan pembelian saham perusahaan.

2. Faktor eksternal, yakni faktor di luar perusahaan yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan meliputi:
 - a. Kondisi ekonomi. Apabila kurang baik kondisi ekonomi negara, maka akan menurunkan investasi. Kondisi perekonomian dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama investor yang kemudian dapat berpengaruh terhadap penurunan harga pasar perusahaan, namun bila baik maka investor lebih tertarik untuk berinvestasi berupa saham daripada ditabung, sebab dinilai lebih memberikan keuntungan.
 - b. Tingkat suku bunga. Bila tergolong tinggi tingkat suku bunga suatu negara, maka investor akan cenderung lebih memilih menabung sebab mereka tidak menanggung Risiko besar.
 - c. Tingkat inflasi. Secara ringkas, inflasi yakni kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus dan berlaku umum. Inflasi ini bisa merugikan pemegang uang berbentuk tunai. Bila terjadi peningkatan inflasi, juga akan menjadikan harga saham turut mengalami peningkatan.
 - d. Faktor psikologi. Terjadinya hal ini dikarenakan apabila terjadi penurunan harga pasar saham, maka investor akan melakukan penjualan saham sebab akan merugi. Apabila ini terjadi dan pemegang saham melakukan penjualan, maka akan menjadikan harga saham menurun.
 - e. Keputusan pemerintah di bidang ekonomi. Secara langsung dan tidak langsung Keputusan ekonomi dan Keputusan pemerintah yang sifatnya umum dapat mempengaruhi harga saham.”

2.1.3.3 Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan diukur melalui berbagai indikator yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan. Berikut jenis pengukuran nilai perusahaan menurut Fahmi (2020:143-144) sebagai berikut

1. *Earning per Share* (EPS)

Bentuk keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham berdasarkan setiap lembar saham yang dimiliki. Berikut rumus terkait *Earning per Share*

$$\text{Earning per Share (EPS)} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

2. *Price Earning Ratio*

Perbandingan antara harga pasar saham per lembar saham dengan laba per lembar saham. Bagi para investor, semakin tinggi *Price Earning Ratio*, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga semakin meningkat. Berikut rumus terkait *Price Earning Ratio*

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Harga pasar per lembar}}{\text{Laba per lembar saham}}$$

3. *Book Value per Share*

Rasio yang digunakan untuk membandingkan ekuitas pemegang saham dengan total saham beredar.

$$\text{Book Value per Share (BVS)} = \frac{\text{Totak Ekuitas}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

4. *Price Book Value*

Rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham perusahaan. Berikut rumus terkait *Price Book Value*

$$\text{Price Book Value (PBV)} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

5. *Dividend Yield*

Rasio yang membandingkan dividen per lembar saham dengan harga saham. Berikut rumus terkait *dividend yield*

$$\text{Dividend Yield} = \frac{\text{Dividende per Share}}{\text{Market Price per Share}}$$

6. *Dividend Payout Ratio*

Rasio yang membandingkan dividen tunai per lembar dengan laba per lembar saham. Berikut rumus terkait *dividend payout ratio*.

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Dividend per Share}}{\text{Earning per Share}}$$

Pengukuran nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan rasio *price book value* (PBV) karena rasio ini mencerminkan penilaian pasar terhadap kinerja perusahaan serta data terkait pengukuran terdapat dalam laporan keuangan. Perusahaan dengan nilai PBV tinggi, menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kinerja baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2018) ukuran perusahaan adalah cerminan skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti total aset, total penjualan, laba dan beban pajak.

Menurut Riyanto (2016:313) ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan, baik dilihat dari segi nilai saham, nilai penjualan maupun nilai aset.

Menurut Hartono (2020:460) skala perusahaan mencerminkan besar kecilnya suatu entitas yang dapat dilihat melalui jumlah aset, pendapatan penjualan dan total ekuitas perusahaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui berbagai indikator keuangan seperti total aset.

2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai berikut

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur menurut pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/PJOK.04/2017 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

1. “Emiten dengan aset skala kecil yang selanjutnya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:

- 1) Pengendali dari emiten atau perusahaan public yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan
 - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
- a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) Pengendali dari emiten atau perusahaan public yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah, dan/atau
 - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

2.1.4.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston, (2018:44) ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Pengukuran ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan logaritma natural dari total aset, karena total aset menunjukkan seluruh sumber daya pada perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi kajian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu terkait topik penelitian yang penulis teliti.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Melvani & Arsjah, (2025) Pengaruh <i>Green Accounting</i> , <i>Intellectual Capital</i> dan Pengungkapan Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen: <i>Green Accounting</i> , <i>Intellectual Capital</i> dan Pengungkapan Lingkungan Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	<i>Green Accounting</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan Pengungkapan Lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2	(Prayogo et al., 2025) <i>ESG Disclosure</i> , <i>Intellectual Capital</i> , <i>Firm Value</i> : <i>Moderating Role of Earnings Management.</i>	Variabel Independen: <i>ESG Disclosure</i> , <i>Intellectual Capital</i> , Variabel Dependen: <i>Firm value</i> Variabel Moderasi: <i>Earnings Management</i>	<i>ESG Disclosure</i> berpengaruh negative terhadap <i>firm value</i> sedangkan <i>Intellectual Capital</i> tidak berpengaruh terhadap <i>firm value</i> , <i>Earnings Management</i> mampu memoderasi <i>ESG Disclosure</i> terhadap <i>firm value</i> tetapi tidak mampu memoderasi <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>firm value</i>
3	(Li et al., 2024) <i>The Effect of ESG Disclosure on Firm Value: An Empirical Evidence from Chinese Listed Companies</i>	Variabel Independen: <i>ESG Disclosure</i> Variabel Dependen: <i>Firm Value</i>	<i>ESG Disclosure</i> has a significant positive impact on <i>firm value</i> using <i>Tobini's Q</i> . while it shows no impact on <i>firm value</i> when measuring using <i>ROE</i>
4	(Hasna et al., 2024)	Variabel Independen: Pengungkapan ESG dan Kinerja Keuangan	Pengungkapan ESG dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ROE tidak

	Pengungkapan ESG dan Kinerja Keuangan bagi Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan	Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan	berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pengungkapan ESG, ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan.
5	(Tampubolon & Suzan, 2024) Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan	Variabel Independen: <i>Intellectual Capital</i> dan Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan	<i>Intellectual Capital</i> dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. <i>Intellectual Capital</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
6	(Pramesti et al., 2024) <i>Environmental, Social, and Governance Disclosure, Intellectual Capital and Firm Value: The Moderating Role of Financial Performance</i>	Variabel Independen: <i>Environmental, Social, and Governance Disclosure, Intellectual Capital</i> Variabel Dependen: <i>Firm Value</i> Variabel Moderasi: <i>Financial Performance</i>	<i>Environmental, Social, and Governance Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. kinerja keuangan mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan <i>Environmental, Social, and Governance Disclosure</i> dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap nilai perusahaan.
7	(Wahyuni & Pramudita, 2024) Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> ,	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen:	<i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

	<i>Intellectual Capital</i> , Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan.	Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan	ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan <i>Intellectual Capital</i> terhadap nilai perusahaan.
8	(Suharto et al., 2024) Pengaruh Pengungkapan ESG dan Net Foreign Flow terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur	Variabel Independen: Pengungkapan ESG dan Net Foreign Flow Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	Kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan ESG dan Net Foreign Flow tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
9	(Shadra & Hutapea, 2024) Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) dan Inovasi Hijau terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen: Pengungkapan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) dan Inovasi Hijau Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	Pengungkapan ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. <i>Green Inovation</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
10	(Vivianita et al., 2023) Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh <i>Sustainable Growth Rate</i>	Variabel Independen: Pengungkapan ESG Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: <i>Sustainable Growth Rate</i>	Pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, <i>Sustainable Growth Rate</i> mampu memperkuat pengaruh Pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan

11	(Putri & Wirajaya, 2023) Modal Intelektual, Nilai Perusahaan dan Manajemen Risiko sebagai variabel moderasi	Variabel Independen: Modal Intelektual Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: Manajemen Risiko	Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, manajemen Risiko mampu memperkuat pengaruh positif modal intelektual terhadap nilai perusahaan
12	(Yuliawati & Alinsari, 2022) Pengaruh Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi	Variabel Independen: Modal Intelektual Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: Profitabilitas	Modal Intelektual dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. profitabilitas berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi.

Sumber: Jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Environmental Social Governance Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan

Environmental Social Governance Disclosure merupakan informasi non-keuangan berupa laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perusahaan terkait pengelolaan risiko serta kegiatan operasional perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial dan tata Kelola. Pengungkapan ini bertujuan sebagai transparansi dan akuntabilitas kepada pihak eksternal perusahaan yang dapat memberikan respon positif terhadap perusahaan. Tingkat transparansi dalam pengungkapan ESG

juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing perusahaan dan memperkuat citra positif di mata public (Qurniasih et al., 2025). Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pengungkapan kinerja ESG yang baik dan tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dalam rasio PBV. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Li et al., 2024), (Hasna et al., 2024) dan (Vivianita et al., 2023) menunjukkan bahwa *Environmental Social Governance Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H1: *Environmental Social Governance Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.2 Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Nilai Perusahaan

Intellectual Capital merupakan aset tak berwujud yang terdiri dari modal manusia, modal relasional dan modal structural yang berkontribusi terhadap penciptaan nilai perusahaan. Nilai pasar meningkat ketika modal intelektual digunakan secara baik oleh perusahaan (Susilawati et al., 2024). Oleh karena itu, para investor cenderung memilih untuk berinvestasi pada perusahaan dengan modal intelektual lebih tinggi dibandingkan rendah (Prayogo et al., 2025). Dengan demikian, pengelolaan *intellectual capital* yang efisien menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik, pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pramesti et al., 2024), (Wahyuni & Pramudita, 2024) dan (Yuliawati & Alinsari, 2022) menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan,

H2: *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan,

2.3.3 Pengaruh *Environmental Social Governance Disclosure* dan *Intellectual Capital* terhadap Nilai Perusahaan

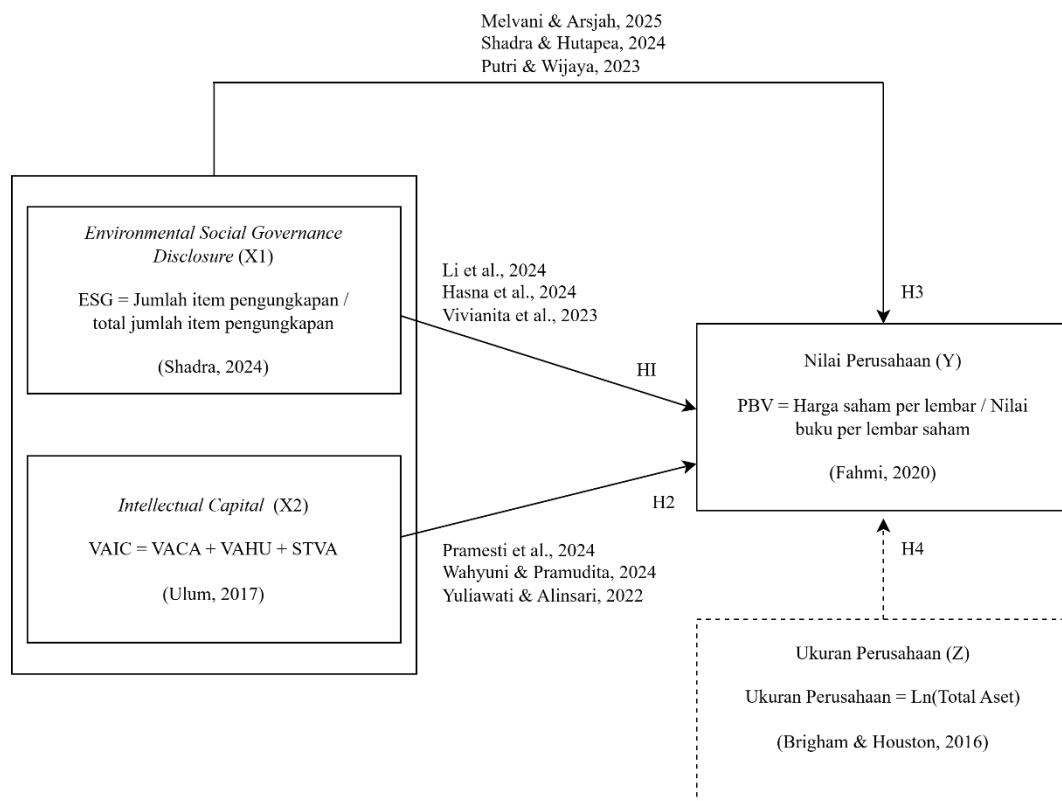
Perusahaan dengan kinerja *intellectual capital* yang efisien memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan aspek ESG secara strategis. Hubungan antara kedua aspek tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat persaingan perusahaan. Selain itu, pengungkapan ESG yang transparan dan pengelolaan *intellectual capital* yang baik dapat memberikan sinyal positif serta meningkatkan kepercayaan investor atau stakeholder terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shadra & Hutapea, 2024) (Melvani & Arsjah, 2025) dan (Putri & Wirajaya, 2023) menunjukkan bahwa *Environmental Social Governance Disclosure* dan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H3: *Environmental Social Governance Disclosure* dan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.4 Pengaruh *Environmental Social Governance Disclosure* dan *Intellectual Capital* terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kapasitas sumber daya lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini memungkinkan perusahaan untuk

melakukan pengungkapan ESG secara komprehensif serta melakukan pemanfaatan modal intelektual secara efisien. Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga investor akan memberikan respon positif dan hal tersebut berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan (Adhi & Cahyonowati, 2023)



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan untuk mengatasi permasalahan penelitian, di mana permasalahan tersebut telah disusun dalam

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2024:63). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Environmental Social Governance Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Hipotesis 2 : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Hipotesis 3 : *Environmental Social Governance Disclosure* dan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Hipotesis 4 : Ukuran Perusahaan dapat menjadi variabel kontrol dalam hubungan antara *Environmental Social Governance Disclosure* dan *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan.